

KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF DALAM MEMBANGUN BUDAYA KEWARGAAN: STUDI KEPEMIMPINAN RIDWAN KAMIL DI KOTA BANDUNG

Puji Lestari¹

pujilestarikrisbiyantoro@mail.unnes.ac.id

Abstrak: Kepemimpinan menjadi instrumen penting dalam budaya politik yang ideal dalam masyarakat demokratis. Kepemimpinan dalam proses membangun budaya politik merupakan suatu hal yang menarik. Kepemimpinan transformatif menjadi tipe pilihan yang ideal yang diharapkan masyarakat dengan pengembangan budaya kewargaan untuk mencapai demokrasi yang diidamkan. Potret kepemimpinan transformatif semakin dekat dengan masyarakat dalam sosok Ridwan Kamil Wali Kota Bandung. Gaya kepemimpinan yang terbuka, dinamis, komunikatif menjadi ciri yang menarik.

Kata kunci: kepemimpinan transformatif, budaya kewargaan, demokrasi

PENDAHULUAN

Kajian mengenai budaya politik merupakan fokus yang menarik sebagai dasar pemahaman untuk mengetahui kondisi masyarakat politik. Secara teoritik menurut Almond dan Verba dalam bukunya *The Civic Culture* menyatakan bahwa budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik (Ishiyama dan Breuning (eds), 2013: 335). Huntington dalam bukunya *The Clash of Civilization* (1996) berpendapat bahwa budaya politik secara inhern stabil dan tidak akan berubah banyak sepanjang waktu. Namun, penelitian empiris oleh beberapa peneliti menjelaskan gejala yang meyakinkan bahwa kebudayaan dapat dan akan berubah sepanjang masa (Ishiyama dan Breuning (ed), 2013:344). Secara teoritik, masyarakat politik bisa berubah dan mengalami perkembangan, dilihat

dalam pembagian kelompok masyarakat dengan budaya politik parokhial, budaya politik subyek dan budaya politik partisipan yang memiliki karakteristik yang berbeda.

Budaya politik partisipan pada awalnya dianggap sebagai budaya politik yang ideal dalam masyarakat demokratis. Dalam bentuk ini, warga negara berasumsi dapat mengekspresikan diri mereka dalam persoalan politik dan mereka juga dijamin punya hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Namun, Almond dan Verba tidak melihat budaya politik partisipan sebagai tipe budaya yang paling mudah dikombinasikan dengan dengan stabilitas rezim demokratis. Sehingga, budaya politik kewargaan dianggap sebagai budaya politik yang merupakan perpaduan dari ketiga bentuk yang mendahuluinya ((Mujani: 2007).

Berubahnya budaya politik dari satu fase ke fase berikutnya, dapat dipengaruhi

¹Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

oleh banyak hal baik berasal dari faktor luar maupun dari masyarakat politik itu sendiri. Penopang laju perubahan budaya politik ini salah satunya adalah lahirnya generasi baru yang kritis yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki potensi untuk memimpin masyarakatnya. Disinilah, kajian mengenai kepemimpinan dalam proses membangun budaya politik merupakan suatu hal yang menarik.

Kepemimpinan politik pasti akan mengalami perubahan, secara otomatis akan mempengaruhi bahkan membawa perubahan pada tipe kepemimpinan itu sendiri. Perubahan yang selalu diharapkan menuju kearah yang diinginkan oleh masyarakatnya.

BUDAYA KEWARGAAN DAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF

Membangun demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat saat ini merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat Indonesia. Terciptanya *civil society* dalam interaksi-interaksi sosial, adanya kesadaran untuk mengaspirasikan kepentingan dari masing-masing warga --yang berarti semua warga harus tereduksi secara baik- dan menganggap semua warga yang mengaspirasikan kepentingannya tersebut berada dalam strata kelas yang sama, mengimplikasikan bahwa disitu tumbuh budaya “kewargaan” (sipil) yang kuat. Lary Diamond, ahli politik yang menekuni tentang perkembangan penelitian mengenai budaya politik, menjelaskannya sebagai keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen dan dialokasikan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik

nasionalnya dan peran dari masing-masing individu dalam sistem itu. Secara praktis, budaya politik merupakan seperangkat nilai-nilai yang menjadi dasar para aktor untuk menjalankan tindakan-tindakan dalam ranah politik.

Lebih jauh diidentifikasi oleh Ishiyama dan Breuning (eds), (2013: 337) bahwa perkembangan budaya politik demokrasi modern telah mendapat dorongan kuat dari hasil riset Putnam (1993) yang mengembangkan pandangan baru atas pertanyaan Almond dan Verba mengenai apa yang membuat demokrasi bekerja? dalam kajiannya mengenai tradisi kewargaan di Italia modern, Putnam menjelaskan 6 elemen dalam budaya politik kewargaan, yakni; kinerja yang bagus dari pemerintah, Interaksi aktif dikalangan warga negara, memberikan kekuasaan pada kelompok yang memperoleh keistimewaan dalam masyarakat, asosiasi sukarela, tekanan publik pada elite politik, dan mengikuti berita-berita politik di media massa.

Budaya kewargaan sesungguhnya merupakan hal yang penting dipahami dalam proses demokrasi agar demokrasi berjalan seperti yang diinginkan. Seperti uraian Purwo Santoso (2016), bahwa “Cara membuat demokrasi berjalan adalah bahwa struktur harus diambil oleh warga negara, bukan pada orang yang membuat keputusan atas nama warga negara. Kewarganegaraan menjadi elemen penting. Yang perlu dilakukan, adalah merumuskan instrumen untuk mengukur demokrasi yang lebih sensitif.” Artinya pelibatan masyarakat, sebagai kolektif dan individu dalam proses kehidupan demokrasi harus dimaksimalkan. Budaya

Kewargaan sering disebut sebagai budaya demokrasi, dimana terdapat komponen-komponan penting yang hendak diwujudkan, yakni; keterlibatan kewargaan yang bersifat sekular, sikap saling percaya sesama warga, toleransi, keterlibatan politis, dukungan terhadap sistem demokrasi dan partisipasi politik oleh warga yang secara keseluruhan ingin diwujudkan (Mujani: 2007).

Kepemimpinan menurut Burn adalah merupakan latihan (*exercise*) yang memobilisasi orang-orang secara institusional politik, psikologi dan sumber daya lain sedemikian rupa untuk membangkitkan, mengikutsertakan dan memuaskan motif-motif para pengikut. Kepemimpinan transformatif menjadi tipe pilihan yang ideal yang diharapkan masyarakat dengan pengembangan budaya kewargaan untuk mencapai demokrasi yang diidamkan. Menurut Burns, kepemimpinan transformatif terjadi saat salah satu atau beberapa orang melibatkan diri dengan yang lain sedemikian rupa sehingga pemimpin dan pengikutnya saling mendorong satu sama lain ke tingkatan motivasi yang lebih tinggi. Jenis kepemimpinan ini ialah sebuah ‘transformasi’, bukan sebuah ‘pertukaran’. Proses bersamaan yang di dalamnya melibatkan pemimpin dan pengikut sebagai bagian dari usaha yang sama. Orang-orang mendorong dan mendukung satu sama lainnya. Mereka melibatkan diri dalam tujuan perusahaan dan mengklaim kepemilikan pekerjaan mereka (Burns, 1978:13). Dalam politik lokal dengan sistem pemilihan kepala daerah langsung ini menjadi lebih mudah dipahami kemunculannya. Harus diakui

kepemimpinan transformatif populer sejak kehadiran Presiden Joko Widodo ketika menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, yang sekaligus menjadi penanda awal tipe kepemimpinan transformatif di Indonesia. Model kepemimpinan transformatif yang diilhami oleh sosok Jokowi seolah merepresentasikan diri sebagai masyarakat biasa, sederhana, jujur, responsif, dan apa adanya sehingga menjadi simbol gerakan rakyat. Gagasan yang ditawarkan amat taktis, mudah dipahami dan rasional. Hal ini dapat memberi harapan perubahan bila model kepemimpinan transformatif dipercaya dapat mengusung moralitas, etika politik, nilai-nilai keteladanan dan berbagai kebijakan prorakyat (Ariyanto, 2015).

Dinamika kepemimpinan transformatif juga tergambar dari cara berkomunikasi interaksional melalui silaturahmi di tengah rakyat. Dengan diksi komunikasi yang sederhana, aplikatif, taktis, dan diaksentuasi niat pribadi dapat menjadi penyebab mengapa kepemimpinan transformatif banyak mendapat dukungan publik. Salah satu gaya fenomenal dalam model kepemimpinan transformatif yakni *blusukan*. Dalam konteks demokrasi, blusukan menjadi sangat relevan saat sebuah rezim yang berkuasa mengklaim pemerintahannya demokratis. Bahkan menurut Somerville (2011) praktik blusukan dinilai selaras dengan prinsip utama demokrasi, yakni kesetaraan karena memotong jarak antara pemimpin dan rakyat.

Setelah itu, kepemimpinan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (44 tahun) adalah salah satu fenomena diantara

beberapa orang muda memimpin dan membawa prestasi baik dalam masyarakatnya. Ridwan Kamil yang sering dipanggil oleh publik dengan panggilan *Kang Emil*, menurut penulis adalah sosok yang menarik untuk dibahas karakter, gaya kepemimpinannya di Kota Bandung. Ia mewakili “orang muda” yang diistilahkan sebagai generasi baru yang kritis dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yang diharapkan menjadi penopang laju perubahan budaya politik dalam masyarakatnya. Melalui perkembangan IT, ia menjadi salah satu sosok yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan warga masyarakatnya untuk membangun budaya kewargaan. Tulisan ini disusun oleh penulis berdasarkan data yang diperoleh melalui komunikasi langsung dengan yang bersangkutan melalui media sosial, dokumen-dokumen program Kota Bandung yang disosialisasikan dan beberapa pendapat warga Kota Bandung.

KANG EMIL DAN BUDAYA KEWARGAAN YANG DIBANGUN

Ridwan Kamil, sejak awal bukan orang yang menekuni kariernya dibidang politik. Ia seorang profesional dan telah banyak karya yang dihasilkannya dalam perkembangan arsitektur di Indonesia. Pada tahun 2013, Emil dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra sebagai wali kota Bandung dengan didampingi oleh Oded Muhammad Danial sebagai calon wakil wali kota. Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung pada 28 Juni 2013, pasangan ini unggul telak dari tujuh pasangan lainnya dengan meraih

45,24% suara sehingga Pasangan Ridwan Kamil dan Oded Muhammad Danial ditetapkan menjadi pemenang dalam Pemilihan umum Wali Kota Bandung 2013 (Wikipedia, 2016). Orang muda, berpendidikan tinggi, *friendly*, cerdas, santun, menjadi kesan pertama yang dapat terlihat dari sosok Sang Walikota.

Berlatarbelakang sebagai seorang yang memulai karier dari nol dibidang arsitektur, pengalamannya sebagai seorang dosen dengan pendidikan di luar negeri memberi bekal pada awal Ia menjalankan tugas sebagai walikota. Persoalan-persoalan yang biasa dan kerap kali rutin dialami oleh masyarakat Bandung mulai diurai untuk dicari jalan keluarnya. Beberapa tahun sebelumnya, Bandung mempunyai masalah-masalah akut seperti; penurunan kualitas lingkungan, buruknya kualitas jaringan jalan dan utilitas, persoalan pertumbuhan kota (*sprawl*), penyediaan transportasi massal untuk masyarakat dan perekonomian masyarakat. Namun, dibalik hal tersebut telah diketahui bersama bahwa Bandung merupakan kota yang memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dengan maksimal. Satu hal yang menarik, adalah gaya kepemimpinan Kang Emil yang lebih terbuka dan komunikatif dan budaya politik kewargaan yang dibangunnya. Seiring dengan kemajuan dan penggunaan media sosial saat ini, beberapa kemajuan dan penataan Kota serta berbagai hal selalu secara rutin ter-*share* di akun-akun yang dimilikinya. Sebagai arsitek, secara bertahap penataan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat untuk mengatur tata kota banyak diketahui oleh *netizen*.

Jalinan komunikasi yang dibangun – sebagai salah satu program walikota sebagai *leader*, kinerja pemerintah kota yang tertata, sistematis dan integral, kepemimpinan, penataan kota, partisipasi masyarakat dan sebagainya.

Putnam (1993) menjelaskan bahwa kehadiran budaya politik warga adalah penentu kinerja pemerintah. Di daerah dengan budaya politik kewargaan yang kuat, pemerintah daerahnya tampak merespons secara lebih efektif terhadap tuntutan warga negara (Ishiyama dan Breuning, 2013: 338). Hal ini, dicoba untuk dibangun oleh Sang Walikota. Ridwan Kamil, menjalankan tugasnya dengan membuka diri, berkomunikasi dengan setiap orang khususnya dengan warga Kota Bandung, para konstituennya melalui media sosial dengan bahasa yang ringan, komunikatif dan responsif. Ini merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat era sekarang. Muda, berbakat, komunikatif dan mau mendengarkan. Setiap hari, setiap saat selain melalui situs resmi *bandung.co.id* program kerja sekaligus aktifitasnya dikomunikasikan melalui beberapa media sosial pribadinya. Suatu gaya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang dijalin oleh Kang Emil, tentu bukan tanpa alasan dan memiliki tujuan. Komunikasi yang dibangun tentu membawa manfaat dalam konteks kepemimpinan yang dijalannya. Komunikasi yang terjalin melalui media sosial ini memiliki beberapa manfaat yang tentu sangat disadarinya sebagai komunikator. Dia ingin “mendengarkan” masyarakat khususnya warga Kota Bandung dan sekaligus dia ingin

mempublikasikan semua program, aktifitas kemajuan yang dia capai sebagai capaian kinerja pemerintahan yang dipimpin.

Secara konseptual, interaksi aktif di kalangan warga negara, sikap politik demokratis akan mengalami internalisasi dan penduduk secara keseluruhan semakin terlibat aktif menjalankan fungsi mereka dalam masyarakat. Ini akan berdampak bersemainya kepercayaan diri masyarakat yang merasa didengarkan, kedekatan penguasa dengan masyarakatnya. Sistem komunikasi yang dilakukan melalui *facebook*, *twitter*, *instagram*, juga memberi kesempatan pada teman, *followersnya* untuk *curhat*, mengeluh, cerita dan merespon kinerja pemerintahannya.

Keterbukaan juga ditunjukkan oleh Kang Emil terhadap masukan *punggawa-punggawa* dalam birokrasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan transformatif menurut Burns pada hakekatnya menekankan seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggungjawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Pemimpin transformasional harus mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan dan mengartikulasikan visi organisasi, dan bawahan harus menerima dan mengakui kredibilitas pemimpinnya. Burns mencatat, bahwa jenis kepemimpinan ini dapat cukup efektif, namun tidak akan berakibat dalam perubahan dalam organisasi atau masyarakat, malah cenderung untuk melestarikan dan melegitimasi *status quo* yang ada. Kepemimpinan transformasional

mencakup dua unsur yang bersifat hakiki, yaitu “relasional” dan “berurusan dengan perubahan riil” (Burns, 1978:16).

Ia sebagai pemimpin harus memahami kondisi riil, kinerja pegawai, bawahannya sehingga jika terjadi persoalan-persoalan sebagai pimpinan ia dengan mudah bersama bawahannya mencari solusi bersama secepatnya. Interaksi ideal konsep kepentingan publik dengan konteks struktur demokratis dapat menciptakan praktik-praktik kepemimpinan yang menciptakan perubahan progresif. Dalam konteks ini diharapkan adanya praktik internalisasi yang dapat mempengaruhi jajaran kepemimpinan di dalam wilayah otoritas politik seperti wali kota terhadap pejabat birokrasi, camat, dan lurah. Selain itu, internalisasi spesifik ditandai oleh kemauan dan intensitas pemimpin turun ke lapangan untuk mendorong kepemimpinan di bawahnya menjalankan tugas pemerintahan sesuai mandat konstitusi dan demokrasi, sehingga menghasilkan sifat kepekaan. Seperti yang terjadi dalam penyelesaian masalah PKL di Jalan Cicadas, parkir liar yang selalu diawali dengan komunikasi langsung dengan bawahan. Kehadiran Walikota di lapangan, bertemu, berdialog, mendengarkan keluhan bahkan langsung menyampaikan solusi menunjukkan sikap responsif terhadap tuntutan masyarakat menjadi hal yang penting. Tidak hanya sebatas tampak dipermukaan atau yang sering dituduhkan oleh beberapa kalangan jika ada pimpinan politik yang turun ke lapangan seringkali hanya pencitraan saja, seringkali masalah juga diurai tuntas dalam pengusutan. Jika terjadi persoalan,

akar masalah ada dimana seringkali dikomunikasikan di media sosial (misalnya postingan instagram @ridwankamil 26 Juni 2016 saat merazia dan menyegel bar yang melanggar aturan atas pengaduan masyarakat). . Segala sesuatu yang dikerjakan pemerintahan Kota Bandung sekarang ini, berbasis pada teknologi serba digital. Dalam beberapa media, Emil menjelaskan dengan teknologi, program dan kinerja birokrat dapat terpantau secara transparan. Mulai dari pelayanan masyarakat dan manajemen keuangan Pemkot Bandung.

"Pelayanan publik kita ubah mindset birokrasi menggunakan teknologi. Kalau masyarakat ingin tahu progres pemerintahan mereka bisa melihat di website berapa persen pekerjaan kami sudah dikerjakan," ujarnya (<http://www.republika.co.id> 17 Maret 2016) diunduh 18 Juli 2016.

Apa yang dilakukan baik sebagai program Kota Bandung dan aktifitas sehari-harinya di publik dan keluarga, menunjukkan kedewasaan dan keluasan lembaga sosial yang ditekuninya. Postingan mengenai klarifikasi anak perempuannya yang tidak diterima di sekolah favorit di Kota Bandung memperoleh tanggapan positif oleh para *followersnya* di media sosial (Agustus 2016). Cara ini unik dan cukup cerdas, untuk menyampaikan pesan moral dan taat aturan olehnya sebagai pemimpin masyarakat yang bisa saja menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan anaknya. Seringkali kepemimpinan transformasional terjadi ketika seorang (atau lebih) berhubungan dengan orang-

orang lain sedemikian rupa sehingga para pemimpin dan pengikut saling mengangkat diri untuk sampai kepada tingkat-tingkat motivasi dan moralitas yang lebih tinggi. Kedewasaan Ridwan Kamil juga diperlihatkan melalui media sosial pada saat banyak isu dan dukungan kepadanya untuk ikut dalam bursa pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Dalam jejaring sosial, ia meminta masukan dan dukungan para *nitizen* untuk memutuskan ikut atau tidak dalam bursa pencalonan. Harapannya warga Kota Bandung akan memberi pendapat. Keputusan untuk tidak mengikuti bursa pun diambil dengan pertimbangan tersebut. Apa yang dilakukan Ridwan Kamil cukup membawa dampak pada masyarakat konstituennya. Disatu sisi masyarakat merasa dihargai karena diminta pendapat mereka. Ini seperti yang digambarkan sebagai ciri kepemimpinan transformasional yakni terjadi sebuah proses dimana padanya para pemimpin dan pengikutnya saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Pemimpin tersebut mencoba menimbulkan kesadaran dari pengikutnya dengan menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral bukan didasarkan pada emosi, kemarahan, kecemburuan atau kebencian. Selain itu, cara di atas juga menumbuhkan kepercayaan politik, kecakapan politik, pengetahuan dan kepentingan politik dan partisipasi politik bagi masyarakatnya.

Kepercayaan politik yang terbangun atau yang disebut sebagai institutional trust, mengacu pada perasaan bahwa warga negara mempunyai kepercayaan pada institusi politik. Kepercayaan politik ini terbangun kerana dukungan yang

diberikan kepada institusi yang dapat disebabkan oleh kinerja, perilaku politisi pemegang kekuasaan dalam hal ini Sang Walikota. Yang kedua adalah terbentuknya kecakapan politik dalam masyarakat. Kecakapan dalam hal ini dipahami sebagai bentuk pemberdayaan politik dimana warga negara mempunyai perasaan bahwa pendapat mereka cukup berarti, bahwa mereka memenuhi syarat untuk berpendapat mengenai politik dan bahwa jika mereka berupaya, maka suara mereka akan didengar dan bahwa pendapat mereka berdampak terhadap proses pembuatan keputusan. Fase selanjutnya, kecakapan politik dapat dilihat sebagai sikap mendorong diri sendiri (*self reinforcing*) yakni semata-mata turut ambil bagian dalam partisipasi akan berdampak pada perkembangan kecakapan. *Celoteh, tweet, postingan*, status yang sering dibuat oleh Emil sering kali merupakan informasi yang dibutuhkan oleh konstituennya. Menjadi motivasi dan membangkitkan minat mereka untuk peduli terhadap Kota tempat tinggalnya. Penduduk kota juga termotivasi untuk berpartisipasi, menyampaikan informasi mengenai kebutuhan dan preferensi mereka kepada para pengambil keputusan politik di Kota Bandung.

Ridwan Kamil termasuk pemimpin yang memiliki motivasi diri yang sangat tinggi dengan jiwa muda dan dorongan berprestasi. Catatan beberapa prestasi akademik dan keaktifan dalam organisasi Osis, Paskibra, sepak bola menunjukkan pengalaman yang cukup di masa lalu. Selain itu, prestasi-prestasi dibidang arsitektur sebagai seorang arsitek, Ridwan

Kamil adalah orang hebat. Ia menjadi salah satu dari sedikit arsitek lapisan atas kelas dunia yang dimiliki Indonesia. Menurut Wikipedia, Ridwan Kamil telah menghasilkan puluhan karya tulis di bidang arsitek urban, membuat karya-karya arsitek di Bandung dan kota-kota lainnya di Indonesia, dan memperoleh penghargaan internasional di bidang arsitektur. Banyak hasil karyanya itu dihasilkan sebelum ia menjadi walikota Bandung. Sekarang, persoalan tata ruang, penataan kota mulai ditata. Menurutnya banyak perubahan yang terjadi dikarenakan sistem pemerintahan yang telah diperbaikinya. Data yang dapat diperoleh dalam *bandung.co.id* menyebutkan Kota Bandung memiliki populasi lebih dari dua juta orang. Sebagai kota yang padat, Bandung mendapatkan indeks kebahagiaan masyarakat sebesar 76. Ini menjadikan Bandung sebagai kota pertama yang konsen pada kebahagiaan masyarakatnya. Pengembangan dan perhatian khusus Pemkot terhadap ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di Kota Bandung. Berbagai produk UKM dihasilkan dari masyarakat Kota Bandung yang unik dan inovatif. Hal ini sejalan dengan prestasi pemerintahannya yang diakui UNESCO sebagai kota kreatif dunia.

SIMPULAN

Semua orang memiliki gayanya masing-masing. Semua pemimpin mempunyai “cap” atas kepemimpinan mereka. Yang menarik dikaji adalah bagaimana cara dan mau kemana gerbong kepemimpinan akan dibawa. Beberapa

pemimpin kadang lebih efektif dari lainnya. Menurut Colquitt, Lepine dan Wesson dalam Wibowo (2015:308) ini dipengaruhi oleh pemilihan gaya pengambilan keputusan secara optimal, bauran perilaku sehari-hari secara optimal dan bauran perilaku transaksional dan transformasional secara optimal.

Dalam penyelenggaraan budaya kewargaan, kepemimpinan mempengaruhi demokratisasi dalam masyarakat. Kepemimpinan transformatif menjadi pilihan yang ideal. Kepemimpinan transformatif yang dilakukan dengan komunikasi yang terbuka antara pemimpin dalam hal ini oleh Walikota Ridwan Kamil dengan konstituen menjadi cara yang ampuh untuk menumbuhkan kepercayaan politik, kecakapan politik, pengetahuan dan kepentingan politik dan partisipasi politik bagi masyarakatnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariyanto. 2015. Kepemimpinan Transformatif di Tingkat Lokal. *www.mahkamah konstitusi.com*.
- Burns, James MacGregor. 1978. *Leadership*. London: Harper & Row.
- Ishiyama dan Breuning (eds). 2011. *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu Sebuah Referensi Panduan Tematis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mujani,S. (2007). *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca- Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

INTEGRALISTIK

No.1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni 2017

- Putnam, R. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Santoso, Purwo. 2016. *Assertive Democracy and Cultural Change*.
- Wibowo, 2015. *Perilaku dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- <http://www.republika.co.id> 17 Maret 2016 diunduh 18 Juli 2016.